

Headline	<b>Kesepakatan Politis Kopenhagen dan Masa Depan Bumi</b>	Language	<b>Indonesian</b>
Date	<b>06 Jan 2010</b>	Page No	<b>B5</b>
MediaTitle	<b>Koran Tempo</b>	Article Size	<b>241 cm<sup>2</sup></b>
Section	<b>Ilmu &amp; Teknologi</b>	Color	<b>Black/white</b>
Journalist	<b>Fitrian Ardiansyah</b>	PRValue	<b>54,421,830</b>
Frequency	<b>Daily</b>		
ADValue	<b>18,140,610</b>		



## **Kesepakatan Politis Kopenhagen dan Masa Depan Bumi**

Headline	<b>Kesepakatan Politis Kopenhagen dan Masa Depan Bumi</b>	Language	<b>Indonesian</b>
Date	<b>06 Jan 2010</b>	Page No	<b>B5</b>
MediaTitle	<b>Koran Tempo</b>	Article Size	<b>241 cm<sup>2</sup></b>
Section	<b>Ilmu &amp; Teknologi</b>	Color	<b>Black/white</b>
Journalist	<b>Fitrian Ardiansyah</b>	PRValue	<b>54,421,830</b>
Frequency	<b>Daily</b>		
ADValue	<b>18,140,610</b>		

### **Fitrian Ardiansyah**

DIREKTUR PROGRAM IKLIM DAN ENERGI WWF-INDONESIA DAN DOSEN TIDAK TETAP PADA PROGRAM PASCASARJANA DIPLOMASI UNIVERSITAS PARAMADINA FARDIANSYAH@WWF.OR.ID

**G**una mencegah perubahan iklim yang dahsyat, secara terus-menerus masyarakat dunia berupaya memastikan tercapainya kesepakatan yang mengikat semua negara. Untuk mencapai hal itu, sekitar dua tahun sejak dari Bali, ratusan negara bernegosiasi di bawah Kerangka Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim.

Banyak orang berharap Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim ke-15 di Kopenhagen tempo hari dapat menghasilkan kesepakatan yang adil, ambisius, dan mengikat. Sebelum pertemuan Kopenhagen, selain konvensi, PBB punya perjanjian yang mengikat yang dikenal sebagai Protokol Kyoto. Namun, protokol ini baru mengatur periode pertama (2008-2012) penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari negara-negara maju sekitar 5 persen dari tingkat emisi pada 1990.

Karena itu, dibutuhkan perjanjian yang mengatur keberlanjutan periode kedua dari Protokol Kyoto serta perjanjian baru yang mengatur seluruh negara untuk secara wajib maupun sukarela mempunyai penurunan emisi besar-besaran.

Diharapkan, negara-negara maju secara berkewajiban menurunkan emisi GRK sebesar 25-40 persen pada 2020 dibanding tingkat emisi pada 1990. Sedangkan negara-negara berkembang secara sukarela menurunkan emisi sekitar rata-rata 30 persen dibanding grafik proyeksi pembangunan layaknya saat ini (*business as usual*).

Seandainya ini tercapai, kenaikan suhu rata-rata muka bumi tidak akan melebihi 2 derajat Celsius—ambang batas yang masih dianggap aman dan belum menimbulkan dampak parah akibat perubahan iklim.

Nyatanya, dinginnya Kopenhagen selama dua pekan seperti-nya hanya memberi jalan bagi 119 kepala negara dan puluhan ribu perunding untuk "sekadar" menghasilkan kesepakatan politis yang dikenal sebagai Copenhagen Accord.

Untuk mendapatkannya memang tidaklah mudah. Walau semua negara terkesan "bergulat" sampai detik terakhir, keputusan yang ada hanyalah berstatus sebagai "catatan semata" (*taking note of the accord*). Status seperti ini tentulah sangat rapuh dan tidak mengikat secara hukum. Nasib bumi dipertaruhkan, sedangkan berbagai aspek untuk menanggulangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim menjadi tidak terlalu jelas.

Kesepakatan politis Kopenhagen memang mencantumkan ambisi global dengan angka 2 derajat Celsius. Hanya, karena tidak ada target pengurangan emisi GRK yang jelas—terutama dari negara-negara maju—dalam penurunan emisi, diproyeksikan suhu rata-rata muka bumi dapat meningkat sampai 3,9 derajat Celsius.

Hal ini dapat mengakibatkan ratusan juta bahkan mungkin hampir setengah miliar penduduk bumi terkena dampak perubahan iklim, dari banjir bandang di daerah pesisir sampai bahaya kelaparan, seperti yang ditulis dalam Review Stern.

Satu hal yang bisa dikatakan "menggembirakan" yang tertuang di dalam kesepakatan politis ini adalah klausul penyediaan dana. Dam Kesepakatan Kopenhagen, negara-negara maju menjanjikan sekitar US\$ 30 miliar sebagai dana tanggap awal (*fast-start financing*) untuk membantu negara-negara berkembang melakukan upaya adaptasi dan mitigasi, termasuk di sektor kehutanan.

Dana itu dapat bertambah sampai US\$ 100 miliar pada 2020. Untuk mengaturnya, akan dibentuk Copenhagen Green Climate Fund. Ini merupakan tanda yang baik, walaupun dana yang ditawarkan masih jauh dari harapan, karena selama bertahun-tahun sangat sulit bagi negara maju berkomitmen mengeluarkan angka pasti kontribusi pendanaan mereka bagi negara berkembang.

Satu hal lagi yang mungkin menguntungkan negara hutan tropis seperti Indonesia adalah diakuinya REDD (pengurangan emisi dari upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan).

Meski demikian, secara keseluruhan kesepakatan politis ini masih jauh dari cita-cita terjaminnya masa depan yang lebih aman bagi kita dan anak-cucu kita akibat dampak perubahan iklim.

Semua negara masih harus mendorong dicapainya perjanjian yang lebih mengikat secara hukum yang diharapkan dihasilkan pada tahun ini. Suatu perjanjian yang secara menyeluruh dapat membuat kita lebih siap menghadapi perubahan iklim beserta dampaknya di tingkat dunia, nasional, dan lokal. ●

Headline	<b>Kesepakatan Politis Kopenhagen dan Masa Depan Bumi</b>	Language	<b>Indonesian</b>
Date	<b>06 Jan 2010</b>	Page No	<b>B5</b>
MediaTitle	<b>Koran Tempo</b>	Article Size	<b>241 cm<sup>2</sup></b>
Section	<b>Ilmu &amp; Teknologi</b>	Color	<b>Black/white</b>
Journalist	<b>Fitrian Ardiansyah</b>	PRValue	<b>54,421,830</b>
Frequency	<b>Daily</b>		
ADValue	<b>18,140,610</b>		

**Gist (En):**

**Gist (En): N/A**